

Overview



Transparency:

70 /100

(Open Budget Index score)



Public
Participation:

20 /100



Budget Oversight:

82 /100

Tentang OBS

Keputusan anggaran pemerintah - pajak apa yang harus dipungut, layanan apa yang harus disediakan, dan berapa banyak utang yang harus diambil - akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyatnya, termasuk kesejahteraan kelompok masyarakat rentan dan tertinggal. Sehingga sangat penting bagi pemerintah untuk memberi informasi dan melibatkan publik pada keputusan-keputusan penting yang berdampak pada kehidupan mereka.

The Open Budget Survey (OBS) merupakan satu-satunya instrumen penelitian independen, komparatif dan berbasis fakta yang menggunakan kriteria yang dapat diterima secara internasional untuk menilai akses publik terhadap informasi anggaran pemerintah pusat; berpartisipasi publik dalam proses penganggaran nasional; dan peran lembaga pengawas anggaran seperti legislatif dan auditor dalam proses anggaran.

Survei ini membantu masyarakat sipil untuk menilai dan berunding dengan pemerintah mereka tentang penggunaan dana publik. Edisi 7 OBS ini dilakukan di 117 negara.

kunjungi www.internationalbudget.org/open-budget-survey untuk informasi lebih lanjut, termasuk methodology lengkap OBS, Laporan Global 2019, temuan-temuan untuk setiap negara, dan eksplorasi data

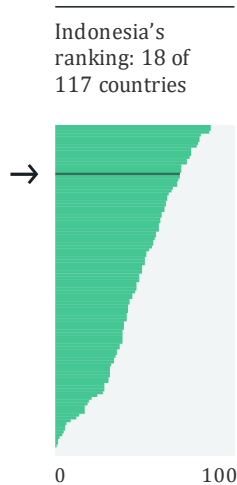


Transparansi

Bagian OBS ini mengukur akses publik terhadap informasi tentang bagaimana pemerintah pusat meningkatkan dan membelanjakan sumber daya publik. Bagian ini menilai ketersediaan data dan informasi secara online, ketepatan waktu, dan kelengkapan dari delapan dokumen anggaran utama. Bagian ini menggunakan 109 indikator dan skor yang berlaku pada setiap negara mulai dari skala 0 hingga 100. Skor transparansi 61 atau lebih menunjukkan bahwa suatu negara kemungkinan telah menerbitkan cukup bahan untuk mendukung informasi. debat publik tentang anggaran.

Pada OBS 2019 ini, Indonesia memiliki skor **70** (out of 100).

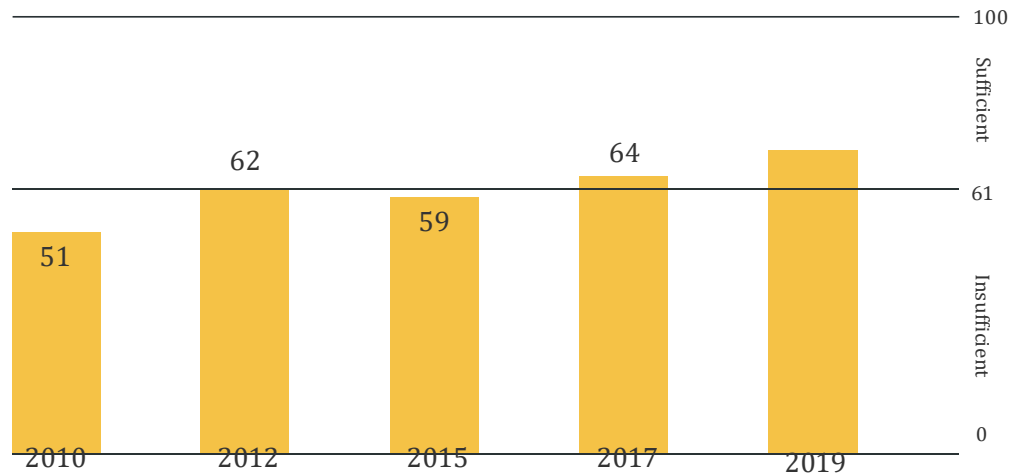
Transparansi di Indonesia Berbanding Negara Lain



Global Average	45
Philippines	76
Indonesia	70
Thailand	61
Malaysia	47
Timor-Leste	40
Vietnam	38
Cambodia	32
Myanmar	28

0 Insufficient 61 Sufficient 100

Perubahan Index Transparansi Indonesia

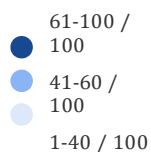


Ketersediaan Dokumen Anggaran di Indonesia

- Available to the Public
- Published Late, or Not Published Online, or Produced for Internal Use Only
- ⊘ Not Produced

Document	2010	2012	2015	2017	2019
Pre-Budget Statement	●	●	●	●	●
Executive's Budget Proposal	●	●	●	●	●
Enacted Budget	●	●	●	●	●
Citizens Budget	●	●	●	●	●
In-Year Reports	⊘	●	●	●	●
Mid-Year Review	●	●	●	●	●
Year-End Report	●	●	●	●	●
Audit Report	●	●	●	●	●

Seberapa Komprehensifkah Dokumen Anggaran yang Dipublikasikan di Indonesia?



Jenis Dokumen Kunci	Tujuan dan Konten Dokumen	Tahun Fiskal	Skor Konten
Pre-Budget Statement	Mengungkap parameter kebijakan fiskal sebelum Proposal Anggaran Eksekutif; menguraikan perkiraan ekonomi, pendapatan yang diantisipasi, pengeluaran, dan utang.	2019	50
Executive's Budget Proposal	Diserahkan oleh eksekutif kepada legislatif untuk disetujui; merinci sumber-sumber pendapatan, alokasi untuk kementerian, usulan perubahan kebijakan, dan informasi lain yang penting untuk memahami situasi fiskal negara.	2019	70
Enacted Budget	Anggaran yang telah disetujui oleh legislatif.	2019	80
Citizens Budget	Versi yang lebih sederhana dan kurang teknis dari Proposal Anggaran Eksekutif pemerintah atau Anggaran yang Diaktifkan. Dirancang untuk memudahkan publik memahami anggaran	2019	80
In-Year Reports	Informasi tentang pendapatan aktual yang dikumpulkan, pengeluaran aktual yang dibuat, dan utang yang timbul. Diterbitkan setiap triwulan atau bulanan.	2018	80
Mid-Year Review	Pembaruan komprehensif tentang implementasi anggaran pada pertengahan tahun fiskal; termasuk tinjauan asumsi ekonomi dan perkiraan terbaru hasil anggaran.	2018	80
Year-End Report	Menjelaskan situasi rekening pemerintah pada akhir tahun fiskal dan, idealnya juga memuat evaluasi kemajuan yang dilakukan untuk mencapai tujuan kebijakan anggaran.	2017	64
Audit Report	Dikeluarkan oleh lembaga audit tertinggi, dokumen ini memeriksa kesehatan dan kelengkapan akun akhir tahun pemerintah.	2017	76

Skor transparansi Indonesia sebesar 70 dalam OBS 2019, lebih tinggi dari skor pada tahun 2017 sebesar 64.

Apa yang berbeda dalam OBS 2019?

Pada tahun 2019, Indonesia telah berhasil meningkatkan ketersediaan dokumen anggaran

- Termasuk klasi kasi ekonomi dalam Proposal Anggaran Eksekutif dan meningkatnya informasi tentang utang dari tahun anggaran sebelumnya.

Rekomendasi

Indonesia perlu untuk memprioritaskan beberapa hal berikut untuk meningkatkan transparansi anggaran:

- Masukkan neraca pemerintah sebagai bagian dari Proposal Anggaran Eksekutif, yang menunjukkan informasi tentang aset keuangan dan nonkeuangan pemerintah.
- Tingkatkan informasi dalam Proposal Anggaran Eksekutif terkait dengan risiko fiskal, seperti kegiatan kuasi-fiskal perusahaan publik (BUMN), kewajiban kontinjensi, dan analisis keberlanjutan jangka panjang dari keuangan pemerintah.
- Laporkan perbedaan antara perkiraan dan hasil aktual untuk indikator kinerja, seperti hasil data nonkeuangan, dalam Laporan Akhir Tahun.
- Buat mekanisme untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi anggaran yang akan disampaikan dalam citizen budget.



Partisipasi Publik

Transparansi saja tidak cukup untuk meningkatkan tata kelola. Partisipasi publik yang inklusif sangat penting untuk mewujudkan hasil positif yang terkait dengan transparansi anggaran yang lebih besar.

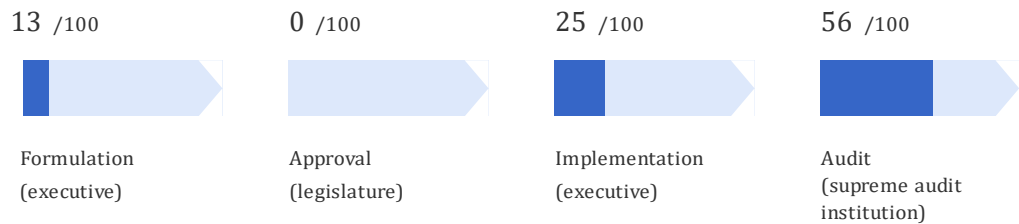
OBS juga menilai peluang formal yang ditawarkan kepada publik untuk partisipasi dalam berbagai tahapan proses anggaran. Bagian Ini meneliti praktik-praktik partisipasi yang dilakukan pemerintah pusat, legislatif, dan lembaga audit tertinggi (SAI) menggunakan 18 indikator yang sama bobotnya. Selaras dengan Inisiatif Global untuk Prinsip Transparansi Fiskal tentang Partisipasi Publik dalam Kebijakan Fiskal, dan ⁷ menilai setiap negara dalam skala dari 0 hingga 100.

Skor Partisipasi Indonesia pada OBS 2019 ini sebesar **20** (out of 100).

Partisipasi Publik Indonesia Berbanding Negara Lain

Global Average		14		
Philippines		31		
Indonesia		20		
Malaysia		17		
Thailand		13		
Vietnam		11		
Cambodia		6		
Timor-Leste		6		
Myanmar		0		
0	Insufficient	61	Sufficient	100

Partisipasi Publik di Indonesia dalam Tahapan Perencanaan dan Penganggaran



few: 0 - 40; limited: 41 - 60; adequate: 61 - 100

Rekomendasi

Walaupun Kementerian Keuangan Indonesia telah memiliki mekanisme konsultasi publik selama penyusunan anggaran dan konsultasi elektronik selama implementasi tetapi, untuk lebih memperkuat partisipasi publik dalam proses anggaran, perlu juga diprioritaskan tindakan-tindakan berikut:

- Mekanisme partisipasi dalam tahap perumusan anggaran yang membuka diskusi terbuka bagi organisasi masyarakat sipil atau anggota masyarakat yang ingin berpartisipasi.
- Berdiskusi aktif dengan komunitas yang rentan dan kurang terwakili, secara langsung atau melalui organisasi masyarakat sipil yang mewakili mereka.
- Mendukung kementerian lini untuk melakukan konsultasi publik mengenai anggaran untuk masalah-masalah sektor, seperti kesehatan, pendidikan, atau sektor lainnya.

Sementara itu, Lembaga Legislatif dapat memprioritaskan beberapa tindakan berikut:

- Izinkan anggota organisasi masyarakat atau masyarakat sipil untuk bersaksi selama dengar pendapat tentang proposal anggaran sebelum diberikan persetujuan.
- Izinkan anggota organisasi masyarakat atau masyarakat sipil untuk bersaksi selama audiensi tentang Laporan Audit.

Badan Pemeriksa Keuangan Indonesia telah membentuk mekanisme untuk membantu mengembangkan program auditnya. Namun perlu juga untuk memprioritaskan tindakan berikut untuk meningkatkan partisipasi publik dalam proses audit anggaran:

- Menetapkan mekanisme formal bagi publik untuk berkontribusi pada investigasi audit yang relevan.

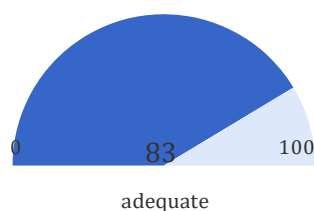


Pengawasan Anggaran

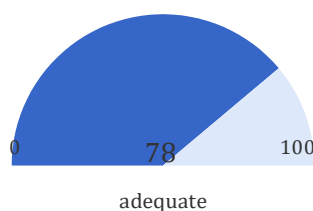
OBS juga memeriksa peran yang dimainkan oleh legislatif dan lembaga audit tertinggi (SAI) dalam proses pengawasan anggaran; setiap negara diberi skor pada skala dari 0 hingga 100 berdasarkan pada 18 indikator yang memiliki bobot yang sama. Selain itu, survei ini mengumpulkan informasi tambahan tentang lembaga keuangan independen (IFI) (lihat Kotak).

Lembaga legislatif dan lembaga audit tertinggi di Indonesia, bersama-sama, melakukan pengawasan yang memadai selama proses anggaran, dengan skor pengawasan komposit 82 (dari 100). Diambil secara individual, tingkat pengawasan masing-masing lembaga ditunjukkan di bawah ini:

Pengawasan oleh Legislatif



Pengawasan oleh Lembaga Audit (SAI)



weak: 0 - 40; limited: 41 - 60; adequate: 61 - 100

Rekomendasi

Walaupun Lembaga legislatif Indonesia telah memberikan pengawasan yang memadai selama tahapan penyusunan anggaran dan pengawasan yang memadai selama tahap implementasi, namun untuk lebih meningkatkan pengawasan, tindakan berikut harus diprioritaskan:

- Komisi anggaran legislatif harus memeriksa Laporan Audit dan menerbitkan laporan temuannya secara online.

Praktek terkait Lembaga Keuangan Independen (IFI)

Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki lembaga keuangan independen (IFI). IFI semakin diakui sebagai penyedia informasi independen dan non-partisan yang berharga bagi Eksekutif dan / atau Legislatif selama proses anggaran.

*These indicators are *not* scored in the Open Budget Survey.

Metodologi

- Hanya dokumen yang diterbitkan hingga 31 Desember 2018 yang dinilai dalam OBS 2019.
- Survei ini didasarkan pada kuesioner yang diisi oleh peneliti independen masing-masing negara . Untuk Indonesia dilakukan oleh:
Yenti Nurhidayat
Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA)
Jl. Tebet Timur Dalam IXC No. 4 RT 012/RW 009 Tebet Timur, Kelurahan Tebet Timur Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan 12820
yenti@seknasfitra.org
- Untuk memperkuat penelitian ini, rancangan kuesioner ditinjau oleh pakar independen anonim, dan juga oleh perwakilan dari Kementerian Keuangan masing-masing negara.